

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II.
- Carol C. Gould, Demokrasi Ditinjau Kembali, (Yogyakarta : Tiara Wacana,1994).
- Hendra Nurtahtjo, Filsafat Demokrasi, (Jakarta: PT.Bumi Aksara 2006), cet I.
- Husein, Harun. (2014). Pemilu Indonesia : fakta, angka, analisis, dan studi banding. Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
- Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram university Press, 2020).
- Solikin, H. N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Penerbit Qiara Media. www.google.com
- Suyanto, S. H. (2023). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan. Unigres Press.
- Warjiyati, S. (2018). Memahami dasar Ilmu Hukum: konsep dasar ilmu hukum.
- Zainal, A. (2012). Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta.

JURNAL

- Abdurrohman (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. Jurnal Pemilu dan Demokrasi, vol 1, no.2.
- Ahsan Jamet Hamidi et al., Pemilu Tidak Bebas Politik Uang, (Jakarta : Transparency International Indonesia, 2008).
- Amrurobbi, A. A. (2021). Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada. Jurnal Adhyasta Pemilu, 4(2). <https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.50>
- Aqdamana, T. (2022). Gagasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional. Lex Renaissance, 7(3).
- Baehaki, K. (2021). Gagalnya Pencegahan Money Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah. Philosophia Law Review, 1(1).

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1).
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1).
- Eldo, D. H. A. P., Abdurochman, L., Fahrulrozi, R., & Meilina, M. (2023). Literasi Politik di Desa: Suatu Upaya Pencegahan Politik Uang Dalam Menghadapi Pemilu 2024. COVIT (*Community Service of Tambusai*), 3(2).
- Fadhilah, O. S. (2024). The Role Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Mengatasi dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum dan Praktik: The Role of the General Election Supervisory Body (BAWASLU) in Overcoming and Taking Action against General Election Violations: A Review of Law and Practice. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*.
- Fadli, M., Bailusy, M. K., Nas, J., & Zulfikar, A. (2018). Keterlibatan elit lokal dalam peningkatan partisipasi politik pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015. *Aristo*, 6(2).
- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik. Resolusi: *Jurnal Sosial Politik*, 1(1).
- Fauzi, Agus Machfud. "Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019". *Journal of Islamic Civilization* 1, No. 1, (2019).
- Fitriani, L. U., Karyadi, W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (*Money Politic*) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1).
- Gary Goodpaster, Refleksi tentang Korupsi di Indonesia, (Jakarta: USAID,2001).
- Halim, A. R. (1987). Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum. *Jakarta: Ghalia Indonesia*.
- Haryani, R. (2023). Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu. *Binamulia Hukum*, 12(1).

- Hermana, M. A., & Jaya, D. P. (2021). Efektivitas badan pengawas pemilihan umum dalam penanganan pelanggaran pada pemilihan umum tahun 2019. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(2).
- Ilham, D. I. R. (2023). Tantangan Dan Harmoni Antara Keadilan Dan Kepastian Dalam Pemilu Serentak Di Indonesia. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 2(1).
- Ja'far, M. (2018). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, 2(1).
- Johny Lomulus, "Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Langsung di Kota Bitung" dalam Demokrasi Mati Suri, *Jurnal Peneitian Politik Vp. 4 No. 1 2007*, LIPI.
- Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Bentuk Pelibatan Masyarakat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3).
- Madjid, M. A. S. (2024). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Maki, K. I. (2020). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik. *Lex Administratum*, 8(4).
- Maula, L. N. M., Astomo, P., & Sabrina, D. F. (2019). Legalitas Penetapan Penjabat Walikota Makassar Sebagai Dampak Dari Pemilihan Kepala Daerah 2018. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 2(1).
- Nabilah, R., Afrizal, S., & Bahrudin, F. A. (2022). Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Publisitas*, 8(2). <https://doi.org/10.37858/publisitas.v8i2.132>
- Nugraha, H. S., Simarmata, D., & Sembiring, I. S. (2018). Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. *Jurnal Juristic*, 1(01). <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

- Nurhayati, Y., Said, My., Hukum, F., Lambung Mangkurat Jlbrigjen Hasan Basry, U., Banjarmasin, K., Brigjen Hasan Basri Komplek Polsek Banjarmasin Utara Jalur, J. H., & Kalimantan Selatan, P. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (Jphi).
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1).
- Perdana, M. T., Alfaris, M., & Iftitah, A. (2020). Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. *Jurnal Supremasi*.
- Prasetyo, M. H. (2020). Kejahanan Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3).
<https://media.neliti.com/media/publications/159226-ID-fenomena-Ramadhani-F.M.-2015-Pelanggaran-Kampanye-Pemilihan-Umum-Perspektif-Fikih-JinĀ¢-yah-Al-Daulah-Jurnal-Hukum-dan-Perundangan-Islam>
- Ramadhani, F. M. (2015). Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fikih JinĀ¢ yah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 5(1).
- Rina Herlina, "Keterbatasan SDM Bawaslu dalam Mengawasi Politik Uang," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 12, No. 2 (2021).
- Rozy, F., Ramadhan, P. A., Febriansyah, R., Fahrurrozi, F. A., Rizky, A. I., & Fauzi, A. M. (2020). Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 7(1). <https://doi.org/10.24036/scs.v7i1.171>
- Sacipto, R. (2019). Kajian Praktik Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagai Cikal Bakal Tindak Pidana Korupsi. *Adil Indonesia Journal*, 1(2).
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1).
<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>

- Seran, G. G. (2017). Pilkada Serentak: Model, Kebijakan, Dan Kaitan Dengan Penguanan Demokrasi Elektoral Di Indonesia. Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi Yang Beretika Dan Demokratis.
- Siahaan, P. G., Purba, N. R., & Robert Naibaho, C. (2024). Pengaruh Tindakan Money politic Terhadap Kualitas Calon Legislatif Dalam Membangun Demokrasi Yang Sehat Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kelurahan Binjai, Medan Denai. CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 9(1).
- Siahaan, P. G., Purba, N. R., Anan, M. J., Ulfa, A., Afifah, A., & Samosir, F. H. M. (2024). Hambatan dalam Melakukan Pembuktian Terhadap Tindakan Money Politic Pada Masa Kampanye 2024. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 4(3).
- Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak politik uang terhadap mahalnya biaya pemenangan pemilu dan korupsi politik. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 5(1).
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, D. I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. 3(1). <Http://Nasional.Republika>.
- Supriyadi, S., & Purnamasari, A. I. (2023). Redesign of Administrative Violation Handling at Bawaslu Post Determination of Election Results: Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif di Bawaslu Pasca Penetapan Hasil Pemilu. Jurnal Konstitusi, 20(1).
- Surya, I., Sos, S., & Dyastari, L. (2017). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2015 Di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang.
- Sutami, S. A., Lapian, M. T., & Wilar, W. (2022). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 (Studi Di Desa Purworejo Kecamatan Modayag). Jurnal Eksekutif, 2(1).
- Syafia, A. D. S. V. N., & Ambarwati, M. D. (2025). Peran Bawaslu Dalam Menangani Kasus Politik Uang Sebagai Tindak Pidana Pemilu. Jurnal Ilmiah Nusantara, 2(1).

- Syaputra, M., Irhamsah, I., & Ridwan, R. (2024). Konsekuensi Hukum Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Mengandung Unsur Penyalahgunaan Keadaan. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4).
- Syarifudin, A. (2020). Pilkada Dan Fenomena Politik Uang: Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2).
- Therasari, A., Wahyudin, C., Apriliani, A., Maruapey, M. H., & Hermawan, D. (2024). Peran Bawaslu dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Pemilu. *Karimah Tauhid*, 3(9).
- Wijaya, B. A., & Zulherawan, M. (2024). Strategi Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Kecurangan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4).
- Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas fungsi pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1).
- Dyani, V. A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. *Lex Renaissance*, 2(1).
- Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas fungsi pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1).
- Zahra, M., Imelda, M., Ar-Rifdah, N., Nurul, R., & Muhammad, A. (2024). Analisis Penerapan Politik Uang Pada Masa Demokrasi Di Kota Serang Provinsi Banten. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Zen, U. F., Budiman, N., & Febrian, R. (2021). Partisipasi dan perilaku politik generasi milenial pada pemilihan bupati tanah datar tahun 2020 di nagari saruaso kecamatan tanjung emas. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 2(2).

UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

TESIS

- Buana, M. S. (2010). *HUBUNGAN TARIK-MENARIK ANTARA ASAS KEPASTIAN HUKUM (LEGAL CERTAINTY) DENGAN ASAS KEADILAN (SUBSTANTIAL JUSTICE) DALAM PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Daerah, P. T. K. P. K., & Oktadinata, R. Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Administrasi
- Jannah, F. S. N. (2023). *Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).
- Pieter, S. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Bupati Yang Melakukan Tindak Pidana Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Merauke (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Pramana, S. A. (2022). Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kota Palembang dalam Pemilu Tahun 2019 (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Putro, W. D., & Oemar, E. N. (2011). *Kritik terhadap paradigma positivisme hukum*. Genta Publishing.

Pramana, S. A. (2022). Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kota Palembang dalam Pemilu Tahun 2019 (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Sengadji, K. G. (2023). Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Asuransi Perkapalan Dalam Penanganan Ganti Rugi Kerusakan Barang (Studi Kasus: PT. Asuransi Central Asia Semarang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

SKRIPSI

Hasanah, R. (2022). Metode Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Perspektif Maṣlahah) (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Reza, C. (2024). Keterlibatan Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024 Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (*Doctoral Dissertation*, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Yuslida Umum, T. P. Praktik Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

WEB

"KIPP Temukan 25 Kasus Dugaan Politik Uang di Jawa Timur" selengkapnya
<https://www.detik.com/jatim/pilkada/d-7667007/kipp-temukan-25-kasus-dugaan-politik-uang-di-jawa-timur>.

Kanya Anindita Mutiarasari, Selasa 12 November 2024.
https://news.detik.com/pilkada/d-7635155/apa-itu-politik-uang-dalam-pilkada-ini-pengertian-jenis-jenis-hingga-sanksinya?utm_source=chatgpt.com

KBBI, 01 Juni 2015, 10.00 Wib, <https://kbbi.web.id/keadilan>

Oktafia Kusuma, Sejarah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, 23 Oktober 2024, https://kawula17.id/artikel/sejarah-pemilihan-kepala-daerah-pilkada-di-indonesia?utm_source=chatgpt.com

Pasal yang mengatur larangan dan sanksi politik uang di pilkada 2024.

<https://nu.or.id/nasional/ini-pasal-yang-mengatur-larangan-dan-sanksi-politik-uang-di-pilkada-2024-7w9tP>

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 Tahun 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/larangan-kampanye-pilkada-lt66f51a6f3d8fd/>

Susi susi, Sanksi Money Politics/Politik Uang. https://pid.kepri.polri.go.id/sanksi-money-politics-politik-uang/?utm_source=chatgpt.com



Lampiran-Lampiran

Lampiran 1. Berita Acara Bimbingan Tugas Akhir



**YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
3 08883077077
soshum@unujo.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama Mahasiswa | : Nurdiana Maisaro |
| 2. NIM | : 2142100024 |
| 3. Prodi | : Hukum |
| 4. Judul Tugas Akhir | : Implementasi Aturan "Dilarang Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye" Dalam Pemilihan Bupati |
| 5. Dosen Pembimbing | : Sulistina, S.H., M.H. |
| 6. Konsultasi | |

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KETERANGAN KONSULTASI/ARAHAN	PARAF
07, 10, 2024	Bimbingan judul skripsi	Revisi judul	
19, 10, 2024	Judul Skripsi + Rumpun Matematik	Ace judul + RM	
20, 11, 2024	Bab I	Revisi Minor, layout Bab 3 II	
04, 12, 2024	Bab II	Tambah Teori, layout Bab II	
08, 12, 2024	Bab III	Ace proposal layout senior	
28, 12, 2024	Seminar proposal	Revisi Bab III & Bab IV	
19, 01, 2025	Bab 2, 4, III	Ace layout Bab IV	
01, 03, 2025	Kerangka pembuktian Bab IV	Revisi kerangka Bab IV	
10, 04, 2025	Bab V	Revisi Bab V	
25, 04, 2025	Bab IV Sub 1 + 2	Revisi pertama pada Bab IV	
03, 05, 2025	Revisi Bab 4.2	Layout kerangka teori	
07, 05, 2025	Bab V	Revisi teori + teori	
10, 05, 2025	Ketimpulan + Saran	Ace saran	

7. Bimbingan telah selesai pada tanggal 10 Mei 2025
Dosen Pembimbing

SULISTINA, S.H., M.H.
NUPTK. 6049772673230353

Lampiran 2. Hasil Cek Plagiasi



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
① 08883077077
soshum@unuja.ac.id

KETERANGAN HASIL CHECK PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, tim check plagiasi Fakultas Sosial dan Humaniora menerangkan dengan sebenarnya, bahwa telah dilakukan check plagiasi dengan persentase 28% (Exclude Quotes dan Exclude Bibliogrpphy) pada tugas akhir/skripsi mahasiswa berikut:

Nama : NURDIANA MAISARO-

NIM : 2142100024

Judul Skripsi : Implementasi Aturan "Dilarang Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye" Dalam Pemilihan Bupati

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dijadikan persyaratan kelayakan mengikuti sidang tugas akhir/skripsi.

Paiton, 17 Mei 2025
Ketua Tim,


RM. FARUQ, S.H.I

Lampiran 3. Riwayat Hidup



Penulis dilahirkan di Konir Jatisari, Arjasa, Situbondo pada tanggal 15 Mei 2004 dari ayah yang hebat yaitu ayah Mulyadi dan ibu yang tangguh yaitu ibu Karsiyati. Penulis adalah putri pertama dari 2 bersaudara, yakni kakak dari adik yang bernama Achmad Rihun Azifun. Penulis memulai Pendidikan Formal Pada Tahun 2010-2015 di SDN 4 Arjasa, Tahun 2015-2018 di MTs Ibrahimy Sukorejo, Tahun 2018-2021 di SMA Ibrahimy Sukorejo dan pada tahun yang sama Penulis masuk Universitas Nurul Jadid melalui jalur Reguler dan memilih masuk di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora. Selama mengikuti perkuliahan, Penulis menjadi aktif di berbagai organisasi baik intra maupun ekstra Kampus, pada Tahun 2022-2023 sebagai Anggota Departemen Advokasi Himaprodi Hukum, Tahun 2023-2024 sebagai Ketua DPM Fakultas Sosial dan Humaniora. Penulis juga aktif di Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Nurul Jadid pada Tahun 2022 sebagai Anggota Biro LitBang, Tahun 2023-2024 sebagai Anggota Biro Keagamaan, Tahun 2024 sebagai Sekretaris Pelaksana SMC (Sekolah Muslimah Cendikia). Penulis juga pernah aktif dalam kepengurusan Pesantren Wilayah Az-zainiyah pada Tahun 2022-2024 sebagai Wali Asuh serta BK/WA Daerah Robiatul Adawiyah, Tahun 2023 sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Libur UAS Wilayah Az-zainiyah, serta Penulis juga aktif diberbagai kajian ilmiah seperti seminar, pelatihan legislasi dan lain lain.